

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab sebelumnya telah membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Pada bab ini penulis akan membahas tinjauan pustaka yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang metode, teknik dan teori yang berkaitan dari penelitian terdahulu dan dari beberapa ahli untuk mendukung serta memperkuat peneliti dalam melakukan penelitian.

Bab ini akan diawali dengan pembahasan mengenai teori *gender* dan politik. Akan diuraikan beberapa teori tentang *gender* yang berkaitan dengan urusan publik dan politik, teori *gender* yang berkaitan dengan penelitian ini adalah teori kelas yang dibawa oleh Karl Marx dan teori Antonio Gramsci dan Louis Althusser yang membahas tentang ideologi dan kultural, serta teori yang dibahas oleh Teller Carver yang memfokuskan pada teori feminis.

A. *Gender* dan Politik

Istilah *gender* diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya dan yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (*gender*).

Gender merupakan nilai atau ketentuan yang membedakan identitas sosial laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam hal ekonomi, Politik, sosial di dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa. Secara mendasar, *gender* berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Tetapi jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminine adalah gabungan blok-blok bangunan dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita (Mosse, 2007:2).

Mosse (2007:3) juga mengemukakan definisinya tentang *gender* yaitu: “*Gender* adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin”. Coates (1997:3-4) mengatakan Jenis kelamin dan *gender* berbeda, Jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan *gender* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kategori yang dibangun secara sosial berdasarkan Jenis kelamin.

Gender merupakan suatu yang penting dalam studi politik, asalkan mereka dapat langsung menyesuaikan dalam setiap permasalahan. Apakah politik *gender* dapat mempengaruhi kinerja perempuan di bidang politik, hal ini dapat dilihat dari kemandiriannya atautkah hanya cukup untuk berorientasi pada kaum laki-laki saja (Randall dan Waylen, 2002)

Teori pertama, Terrell Carver mengatakan dalam teorinya bahwa ia lebih fokus terhadap teori feminis yang didefinisikan sebagai penindasan

perempuan dan studi *gender* yang didefinisikan sebagai cara-cara jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta seksualitas (prilaku seksual) menjadi kekuatan hubungan antar masyarakat. Selain itu telah muncul dalam benaknya dari kedua perspektif tersebut maka ia memfokuskan kepada permasalahan pada laki-laki dalam dua hal antara lain kekuasaan mereka terhadap perempuan dan bagaimana mereka memandang *gender* dalam masyarakat (Randall dan Waylen, 2002)

Terrell Carver juga mengatakan dalam teori politik *gender* nya bahwa politik *gender* antara laki-laki, tidak selalu bertentangan dengan perempuan atau konsepsi kepentingan perempuan yang digadag-gadangkan dalam studi *gender*. Jika jenis kelamin terkait dengan politik *gender* itu bukan untuk konsepsi individual jenis kelamin dan perilaku seks.

Disatu sisi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya orang yang kulit putih akan diperlakukan secara rata. maka , keadaan natural *gender*, jenis kelamin, kelas, etnis telah dimanipulasi guna membangun pengecualian terhadap kelompok tertentu baik di dalam maupun di luar yang berhubungan dengan batasan-batasan dan berbagai pembedaan, sehingga menjadi kekuatan masyarakat untuk melawan musuh dan dapat bergengsi dalam mitra didalam persaingan politik (Randall dan Waylen, 2002)

Feminisme menurut Cott mengandung tiga komponen penting, antara lain:

1. Keyakinan bahwa tidak ada perbedaan hak berdasarkan seks (Sex Equality) yang menentang adanya posisi hierarkis diantara jenis kelamin. Persamaan bukan hanya kuantitas, tapi juga mencakup kualitas. Posisi

relasi hierarkis menghasilkan posisi superior dan inferior, di sini terjadi kontrol dari kelompok superior terhadap inferior.

2. Suatu pengakuan bahwa dalam masyarakat telah terjadi konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Relasi laki-laki dan perempuan yang ada sekarang, merupakan hasil konstruksi sosial, bukan ditentukan oleh nature (kodrat Ilahi).
3. Berkaitan dengan adanya identitas dan peran *gender*. Feminisme menggugat perbedaan yang mencampuradukan seks dan *gender* sehingga perempuan dijadikan sebagai kelompok tersendiri dalam masyarakat (Murniati, 2004)

Teori feminis telah banyak menganalisis mengenai ranah publik-privat, khususnya yang terkait dengan ketidaksetaraan di dunia kerja. Ada tiga pandangan mengenai hal ini. Yang pertama, peran domestik perempuan dalam keluarga patriarkal yang terkesan mengenyampingkan perempuan di sektor publik.

Hal ini berkaitan dengan waktu perempuan yang harus dicurahkan untuk mengurus urusan rumah saja. Kedua, pandangan tentang sektor publik yang mempengaruhi posisi perempuan di dalam keluarga. Sylvia Walby: 1986, misalnya menegaskan bahwa posisi perempuan dalam keluarga lebih ditentukan dengan bagaimana posisi mereka di sektor kerja saja.

Pandangan ketiga, Gillian Pascal : 1997, menyebut pandangan kedua terlalu berlebihan, Pascal berpendapat bahwa relasi *gender* dalam sektor kerja harus dilihat dari seberapa besar keterkaitan antar keluarga dan sektor kerja. Yakni

keluarga mempengaruhi kerja dan kerja mempengaruhi keluarga. Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan ada sejumlah faktor yang saling mempengaruhi dan membuat pandangan bahwa posisi perempuan disektor kerja dan ranah publik pada umumnya terlihat rendah (Hadiz, 2004)

Teori selanjutnya adalah teori yang diusung oleh Karl Marx yaitu teori kelas, teori ini mengacu pada ketidakadilan pada ekonomi dan kaitannya dengan sistem sosial yang lebih luas. Marx mengemukakan bagaimana hubungan antara manusia terjadi dapat dilihat dari hubungan antara posisi masing-masing terhadap sarana produksi, yaitu dilihat dari usaha dan pendapatannya dalam bidang ekonomi.

Marx mencatat bahwa perbedaan tersebut tidak selalu menjadi penyebab pertikaian antar golongan. Tetapi ia membenarkan bahwa tiap golongan masyarakat mempunyai cara khas yang dapat menimbulkan konflik antar golongan karena masyarakat secara sistematis menghasilkan perbedaan pendapat antara orang-orang dan golongan yang berbeda tempat seperti suku, budaya, jenis kelamin, kehidupan sosial, bahkan politik (Fakih,2004: 48)

Tanter dan Young menyatakan bahwa ada variasi-variasi kelas dalam ekspresi seksualitas yang diwarnai oleh implikasi-implikasi politik. Hampir sebagian besar masyarakat memilih pemimpin formal pria. Karena itu keputusan yang menyangkut orang banyak (publik) sering lebih ditentukan oleh pria dari pada perempuan. Karena perempuan dianggap dapat membuat keputusan yang salah dan menimbulkan kekacauan dalam urusan publik. (Mosse, 2007:106)

Wilayah publik yang terdiri atas pranata publik, negara, pemerintahan, pendidikan, media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan, perbankan, agama dan kultur, dihampir semua masyarakat di dunia didominasi oleh laki-laki. Ada perempuan individu yang memasuki dan mungkin pada akhirnya memimpin pranata semacam itu. (Mosse, 2007:106)

Namun di mana-mana tidak ada perempuan sebagai satu kelompok yang menjalankan kekuasaan dan pengaruh di wilayah publik dengan cara yang sama seperti yang dilakukan laki-laki. Suku, kelas dan agama mungkin memainkan peran besar dalam memutuskan laki-laki mana yang menjalankan kekuasaan, tetapi akses perempuan terhadap kekuasaan senantiasa lebih kecil dibandingkan akses laki-laki dari latar belakang yang sama (Mosse, 2007:106)

Selanjutnya teori Antonio Gramsci dan Louis Althusser yang mengemukakan teori ideologi dan kultural serta menggugat keduanya karena dianggap sebagai alat dan bagian dari mereka yang diuntungkan untuk meneruskan ketidakadilan. Keduanya juga mengkritik teori di atas agar lebih lagi menyeimbangkan perempuan dan laki-laki (Fakih, 1996: 59)

Dari beberapa teori yang telah diuraikan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa teori feminis bicara tentang perilaku seks bukanlah jenis kelamin laki-laki dan perempuannya, karena teori ini banyak dipelajari secara sosial bukan secara biologis. Sebenarnya teori ini bersifat fleksibel untuk merangkul satu kompleksitas dan dengan mempertimbangkan masalah diri sendiri serta masalah dari diri sendiri dan masalah sosial.

Dapat dikatakan dalam teori politik sendiri tidak ingin memberikan perbedaan laki-laki dan perempuan, karena hal seperti itu akan mengganggu hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan. Namun pada kenyataannya ketidakadilan pada perempuan masih saja terjadi hal ini juga dikarena keterkaitannya dengan perbedaan kelas dan ideologi serta kultur budaya yang masih kuat mempengaruhi.

Hegemoni kekuasaan memunculkan ketidakadilan *gender*. Ketidakadilan *gender* disebabkan oleh perbedaan *gender* yang bisa dialami oleh pria dan perempuan khususnya. Ketidakadilan *gender* merupakan sistem dan struktur dimana baik pria maupun perempuan menjadi korban tersebut. (Fakih, 1996).

Ketidakadilan *gender* termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih banyak dan panjang, serta sosialisasi ideologi nilai peran *gender*. Manifestasi ketidakadilan *gender* ini tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berhubungan dan saling mempengaruhi secara dialektis (Fakih, 1996).

Oleh sebab itu perempuan merupakan kelas tersendiri karena kurangnya kekuasaan mereka baik bidang sosial maupun ekonomi. Pemikiran ini didasari oleh filsafat eksistensi laki-laki (suami) dalam kultur Lampung mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi untuk bekerja di sektor luar rumah sedangkan perempuan (isteri) kultur Lampung sangat berpengaruh kepada suami dan hanya berkutat pada sektor domestik.

B. Budaya Politik

Pada bahasan awal, telah dibahas tentang *gender* dan politik dan selanjutnya akan membahas tentang budaya politik, Sebelum masuk membahas tentang budaya politik, ada baiknya penulis ingin sedikit memaparkan tentang budaya sebagai berikut.

Didalam buku yang ditulis oleh Zuhro, Dkk (2009) tak sedikit ilmuwan sosial yang melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan budaya, seperti Almond, Verba, Pye dan Lipset. Pada tahun 1985 Lawrence Harrison menerbitkan buku tentang "*Underdevelopment is a State of Mind: The Latin American Case*". Berdasarkan kajian tersebut ia mengatakan bahwa budaya adalah suatu hal yang menjadi penghambat utama untuk berkembang.

Tetapi lain halnya dengan pendapat ilmuwan sosial antara lain Putman, Lipset, Fukuyama, Kaplan dan Huntington. Mereka ini melihat budaya sebagai pengaruh utama, meskipun bukan satu-satunya terhadap perilaku sosial dan ekonomi, baik itu pengaruh baik atau buruk.

Selanjutnya penulis akan memaparkan tentang budaya politik. Menurut Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai sikap individu terhadap sistem dan komponen-komponennya dan juga sikap individu terhadap peranan yang dimainkan dalam sistem politik. dengan kata lain, budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap obyek sosial, dalam hal ini sistem politik, (Zuhro, Dkk, 2009:33). Penilaian baik atau buruknya

seseorang terhadap sistem politik dapat terlihat dari corak orientasi budaya politik yang dimilikinya.

Lebih lanjut, Menurut Almond dan Verba kebudayaan politik ini bukanlah kebudayaan modern, tapi suatu kombinasi antara modernitas dengan tradisi. Inggris memberikan suatu contoh bagaimana kebudayaan ini dapat dikembangkan. Pembangunan kebudayaan itu di negeri Inggris dapat dianggap sebagai produk rangkaian pertemuan antara modernisasi dan tradisionalisme, perpaduan tersebut berlangsung cepat sehingga mampu menciptakan perubahan mendasar, tapi tidak begitu tajam atau terkonsentrasi, sehingga ia tidak menimbulkan disintegrasi dan polarisasi (Almond dan Verba, 1984:6).

Adapun konsep budaya politik adalah kebudayaan majemuk yang didasarkan pada komunikasi dan persuasi, budaya konsensus dan diversitas, suatu kultur yang mengizinkan berlangsungnya perubahan sekaligus melunaknya (Almond dan Verba, 1984:5-6)

Disamping orientasi terhadap sistem politik, menurut Almond dan Powell, terdapat aspek lain dari budaya politik yang berkaitan dengan pandangan dan sikap individu masyarakat sebagai sesama warga negara. Sikap dan pandangan ini berkaitan dengan rasa percaya dan permusuhan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya, atau dengan golongan satu dengan golongan lainnya dalam masyarakat (Zuhro, Dkk, 2009:33).

Perasaan-perasaan yang merupakan cerminan dari budaya politik tersebut dapat terlihat pada pandangan dan sikap seseorang terhadap pengelompokan

yang ada disekitarnya dalam bentuk kualitas politik antara lain konflik dan kerjasama, maka dari itu konflik dan kerja sama itu lah yang nantinya akan menjadi sebuah warna dalam budaya politik masyarakat.

Almond dan Verba (1984:20-23), membagi kebudayaan politik dalam tiga jenis, yaitu :

1. Budaya politik parokial,

Budaya politik parokial merupakan [tipe budaya politik](#) yang paling rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasi dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut.

Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik. Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik.

Tidak munculnya perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik tersebut menyebabkan sulitnya membangun demokrasi dalam budaya politik parokial. Demokrasi dalam budaya politik parokial hanya dapat dibangun jika terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya politik parokial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum, objek-objek input, objek-objek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.
- Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.
- Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan terhadap perubahan komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.
- Kaum parokial tidak mengharapkan apa pun dari sistem politik.
- Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana ketika spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.
- Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.

2. Budaya politik kaula

Budaya politik kaula lebih rendah satu derajat dari budaya politik partisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman jika membicarakan masalah-masalah politik.

Demokrasi sulit berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek karena tiap-tiap warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah sehingga sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem politik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri budaya kaula atau subjek sebagai berikut.

- Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu. Akan tetapi, frekuensi orientasi terhadap objek-objek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
- Para subjek menyadari adanya otoritas pemerintah.
- Hubungannya terhadap sistem politik secara umum dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.
- Orientasi subjek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.

3. Budaya politik partisipan

mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan. Mereka juga memiliki

kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes jika terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair.

Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi karena adanya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah. Hal itu ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik warga negara yang tinggi dalam menyelesaikan sesuatu hal secara politik. Warga negara merasa memiliki peran politik. Mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik.

Selain itu, warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela karena adanya saling percaya (trust) antarwarga negara. Oleh karena itu, dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri budaya partisipan sebagai berikut.

- Frekuensi orientasi politik sistem sebagai objek umum, objek-objek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.
- Bentuk kultur politik anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit. Masyarakat pun aktif terhadap sistem politik secara komprehensif. Selain itu, masyarakat juga aktif terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik).

- Anggota masyarakat bersikap partisipatif terhadap objek politik (tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi).
- Masyarakat berperan sebagai aktivis.

Perkembangan budaya politik masyarakat dipengaruhi oleh kompleksitas nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Maka dengan demikian, kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar nilai yang memungkinkan timbulnya kontak-kontak diantara budaya politik suatu kelompok atau golongan, yang mungkin lebih tepatnya sub budaya politik, yang pada dasarnya merupakan proses terjadinya pengembangan budaya bangsa.

Dapat peneliti simpulkan bahwa budaya merupakan sebuah kepercayaan masyarakat untuk dijadikan suatu dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat karena mempunyai sistem nilai yang dinamis dan tidak statis sehingga cenderung mengalami perubahan dari masa ke masa. Maka dari itu budaya dijadikan sebagai sumber utama untuk penentuan nilai-nilai sakral yang ada di masyarakat. Hal ini juga yang menjadikan budaya itu sebagai salah satu penghambat seseorang atau kelompok atau bahkan wilayah untuk berkembang sesuai dengan keadaan zaman sekarang.

Maka dengan kata lain, budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat di dalam kehidupannya

dan budaya politik yang berkembang di negara Indonesia adalah kebanyakan masih budaya politik tradisional di setiap daerah.

C. Budaya Politik Perempuan

Budaya politik patriarki di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilawan. Tetapi kurangnya dukungan budaya dan persepsi masyarakat, regulasi yang ditetapkan tidak terlalu banyak mendorong jumlah keterwakilan perempuan.

Siasat partai bahkan untuk mengisi kuota ini sangat mengecewakan, yaitu dengan mengambil caleg perempuan yang sudah populer seperti artis atau perempuan pengusaha. Suatu tindakan pragmatis yang justru mengabaikan keseriusan proses politik atau perempuan yang tidak populer hanya dijadikan sebagai pemanis, tidak sungguh-sungguh menempatkan mereka di wilayah strategis.

Ini terlihat dari penempatan perempuan di nomor urut sepatu (paling belakang) atau di daerah pemilihan yang “gersang” yang wilayah tersebut justru menolak kehadiran caleg perempuan. Bahkan, partai politik melepaskan tangan caleg-caleg perempuan, dengan segala keterbatasannya harus bertarung dan berebut suara dengan caleg laki-laki dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Dari proses tersebut, kita dapat melihat hasilnya, sedikit yang duduk di parlemen, dan walaupun ada, mereka jarang berpartisipasi aktif dalam tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan (Pramasetya, 2012: 48).

Dari tingkat lokal ke global, kepemimpinan perempuan dan partisipasi politik kerap dibatasi. Perempuan hanya diposisikan sebagai pemilih, dan kurang merepresentasikan diri di posisi terdepan, baik di pemerintahan, kantor, layanan sipil, sektor swasta atau akademisi. Hal ini terjadi di berbagai negara, meski terbukti kemampuan mereka sebagai pemimpin dan agen perubahan, dan hak mereka untuk berpartisipasi secara setara, diakui dalam pemerintahan yang demokratis (Pramasetya, 2012: 49).

Perempuan menghadapi beberapa hambatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hambatan struktural melalui hukum dan institusi yang diskriminatif masih membatasi pilihan perempuan mencalonkan diri untuk jabatan tertentu. Kesenjangan kapasitas juga menjadi hambatan, yang berarti bahwa perempuan sangat kurang, dibandingkan pria, untuk memiliki pendidikan, kontak dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif (Pramasetya, 2012: 50).

Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 2011 menyisakan catatan partisipasi politik perempuan, bahwa perempuan di belahan dunia mana pun kerap terpinggirkan dari ranah politik, sering sebagai akibat dari hukum yang diskriminatif, praktik, sikap dan stereotip gender, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan dan efek dari kemiskinan terhadap perempuan yang tidak proporsional.

Mungkin ada beberapa individu yang berhasil menembus dinding patriarki itu, tapi perempuan secara keseluruhan, perlu adanya kesempatan yang seimbang. Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Perempuan menjunjung tinggi hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik (Irawati, 2009: 45).

Politik tetap menjadi 'permainan' laki-laki, dan sengaja dikonstruksi demikian. Isu-isu berbau primordial dan agama seputar kepemimpinan perempuan turut diakomodir untuk melanggengkan kuasa patriarkis. Akibatnya, perempuan disubordinasi sehingga pola pikirnya dipengaruhi agar merasa kurang percaya diri dalam berkarir di bidang yang penuh tantangan seperti politik. Perempuan menjadi wanita yang harus *wani ditata* laki-laki.

Berapa banyak perempuan yang kritis, tapi mereka tidak mendapat peran signifikan di parlemen dan juga kabinet. Padahal, Indonesia memerlukan lebih banyak perempuan dalam figur peran publik yang tinggi. Di sini dibutuhkan revolusi mental dalam pendidikan politik, utamanya perempuan agar mereka dapat mencapai apa pun yang mereka putuskan, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk tujuan yang tinggi, terlepas dari latar belakang *gender* mereka (Irawati, 2009: 45).

Budaya patriarki di masyarakat masih menjadi penyebab perempuan terbelakang dan buta politik. Perempuan masih dianggap sebagai *konco wingking* (teman terbelakang) yang tugasnya hanya 3 M; Masak, *Manak* (Melahirkan anak), dan *Macak* (bersolek).

Pendidikan yang diaplikasikan di dunia pendidikan juga masih berfokus pada urusan domestik yang spesifik untuk perempuan. Kebijakan keluarga masih

didominasi laki-laki karena lazimnya di akar rumput masyarakat, tingkat pendidikan perempuan tidak diutamakan dan cenderung diabaikan.

Berbeda dengan laki-laki yang pendidikannya diutamakan karena mereka dianggap calon kepala keluarga dan tulang punggung ekonomi. Sementara itu, gerak perempuan harus disesuaikan oleh konsep yang dibuat laki-laki. Ketika partai politik tidak serius untuk menangani persoalan keterwakilan perempuan dalam arena politik, semua jargon kuota itu hanya basa-basi saja (Irawati, 2009: 46).

Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan bagi kandidat perempuan yang hendak terlibat dalam arena politik, agar membantu membangun kapasitas mereka, dan juga mengampanyekan pada para pemilih akan kesetaraan *gender*, termasuk untuk mengampanyekan pembebasan dari intimidasi yang terjadi saat pemilu berlangsung.

Langkah pemberdayaan perempuan ini harus didukung oleh masyarakat sipil, utamanya generasi baru bangsa ini, baik laki-laki dan perempuan, dalam mengadvokasi langkah-langkah pengambilan kebijakan publik yang tidak mengenyampingkan perihal kesetaraan *gender*.

D. Etnis dan Budaya Lampung

Sebelumnya telah dibahas mengenai budaya politik, selanjutnya akan di bahas mengenai etnis dan budaya Lampung, pembahasan mengenai etnis dan budaya Lampung dalam penelitian ini bertujuan untuk memperjelas masalah yang ada

pada penelitian ini, peneliti merasa tinjauan ini relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Asal-usul *Ulun* Lampung (orang Lampung) erat kaitannya dengan istilah Lampung sendiri, walaupun nama Lampung itu mungkin sekali baru dipakai lebih kemudian dari pada mereka memasuki daerah Lampung. Menurut buku yang ditulis oleh Sujadi yang berjudul *Lampung Sai Bumi Rua Jurai* mengatakan bahwa ada beberapa teori mengenai asal-usul *Ulun* Lampung yaitu :

1. Teori pertama, diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, Lampung berasal dari kata *To-Lang-Po-Hwang*, to berarti dalam bahasa toraja, sedangkan *Lang-Po-Hwang* Kepanjangan dari Lampung , jadi *To-Lang-Po-Hwang* Berati Orang Lampung.. dari catatan musafir Cina yang pernah mengunjungi Indonesia pada Abad VII yaitu *I Tsing*.
2. Teori kedua, Dr. R. Boesma dalam bukunya, *De Lampung sche Districten* (1916) menyebutkan nama Lampung berasal dari Ratu Balau (Si Lampung) yang merupakan keturunan dari makhluk pertama yang diturunkan oleh tuhan yaitu Sang Dewa Sanembahan dan Widodari Simuhun. Termasuk juga Ratu Majapahit (SI Jawa), Ratu Padjajaran (Si Pasundayang).
3. Teori ketiga, legenda Tapanuli menceritakan, zaman dahulu meletus gunung berapi yang menimbulkan Danau Toba. Meletusnya gunung berapi tersebut terdapat empat saudara yang berupaya menyelamatkan dirinya. Salah satunya terdampar di Krui Lampung Barat, salah satu dari empat

bersaudara tersebut adalah Ompung Silamponga. Kemudian ia naik kedataran tinggi dan ia begitu takjub melihat betapa luasnya daerah ini, dengan ketakjubannya tersebut ia meneriakkan kata “Lapping” yang berasal dari bahasa Tapanuli kuno yang berarti terapung atau luas). Dari kata yang sicutuskan tersebutlah maka timbullah kata Lampung. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kata Lampung berasal dari nama Ompung Silamponga.

4. Teori keempat, teori Hilman Hadikusuma yang mengutip cerita rakyat. Pada mulanya *Ulun* Lampung berasal dari Sekalabrak, di kaki Gunung Pesagi, Lampung Barat. Penduduknya disebut Tumi (Buay Tumi) yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Sekarmong. Mereka menganut kepercayaan dinamis, yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu Bairawa. Buai Tumi Kemudian dapat dipengaruhi empat orang pembawa islam berasal dari pangaruyung, Sumatra barat, yang datang kesana.
5. Teori kelima, penelitian siswa sekolah Thawalib Padang Panjang pada tahun 1938 tentang asal-usul *Ulun* Lampung. Didalam cerita Cindur Mato yang berhubungan juga dengan cerita rakyat di Lampung disebutkan tadinya Pangaruyung diserang musuh dari India. Penduduk merasa lemah karena senjata yang digunakan tidak sesuai level negara yang menyerang. Maka rakyat berhamburan untuk melarikan diri ke berbagai daerah, kejadian ini menurunkan beberapa adat, ada yang beberapa ke daerah Bengkulu, Batak, Bugis dan kemudian yang terdampar di Krui dan menurunkan suku Lampung.

Berdasarkan kelima pendapat di atas maka terlihat sangat jelas perbedaan dari berbagai teori tentang asal-usul *Ulun Lampung* yang telah diuraikan, mengenai sejarah memang tidak dapat dipastikan kebenaran secara nyata, namun dari berbagai pendapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa asal mula *Ulun Lampung* ini timbul pertama kali di Krui tepatnya di dataran tinggi Sekala brak Lampung Barat, di situlah mulai timbul kebudayaan Lampung yang ada hingga saat ini.

Pada dasarnya *jurai Ulun Lampung* adalah berasal dari Sekala Brak, namun dalam perkembangannya, secara umum masyarakat adat Lampung terbagi dua yaitu masyarakat adat Lampung Saibatin dan masyarakat adat Lampung Pepadun. Masyarakat adat Saibatin kental dengan nilai aristokrasinya, sedangkan masyarakat adat Pepadun yang baru berkembang belakangan ini menjadi orang abung ke Banten lebih berkembang dengan nilai-nilai demokrasi. Berbeda dengan nilai-nilai Aristokrasi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Adat Saibatin (Sujadi, 2013:74)

Berikut ini adalah wilayah yang termasuk adat saibatin dan pepadun (Sujadi, 2013:74)

Tabel 1. Klasifikasi Daerah yang Terdapat Suku Lampung Sai Batin dan Pepadun

NO	LAMPUNG SAIBATIN	LAMPUNG PEPADUN
1	Lampung Barat	Lampung Utara
2	Lampung Timur	Tulang Bawang dan termasuk Mesuji
3	Lampung Selatan	Way Kanan
4	Tanggamus	Lampung Tengah
5	Pesawaran	
6	Termasuk juga Keratun Komerling (Provinsi Sumatra Selatan) dan	

	Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten)	
--	--------------------------------------	--

Dilanjutkan dengan pembahasan lain, uraian di atas tak lupa pula *Ulun Lampung* mempunyai falsafah hidup, falsafah *UlunLampung* yang termaktub dalam kitab Kuntara Raja Niti. (Sujadi, 2013:75) yaitu:

1. *Piil-Pusangiri*, yang artinya malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri, serta memiliki penghargaan yang tinggi dan orang Lampung merasa punya kehormatan yang tinggi;
2. *Juluk-Adok*, yang artinya mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya, dalam adat Lampung seluruh anggota keluarga atau masyarakat yang tergolong anggota adat di suatu wilayah, maka masing-masing akan diberikan adok sesuai dengan jabatan dan fungsinya dalam adat Lampung;
3. *Nemui-Nyimah*, yang artinya saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu, masyarakat adat Lampung sangat menjaga keharmonisannya dalam hubungan bermasyarakat, tidak heran lagi, bahkan di contoh salah satu desa terdapat hampir seluruhnya kerabat dekat;
4. *Nengah-Nyampur*, yang artinya aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis. Masyarakat Lampung dalam hal ini dituntut untuk maju, bergerak dan ikut berpartisipasi dalam hal kemajuan dan kesejahteraan., dalam hal ini tidak ada batasan umur, jenis kelamin bahkan status ekonomi;

5. *Sakai-Sambaian*, yang artinya gotong royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya. Falsafah gotong royong ini lah memacu semua elemen masyarakat Lampung;

Kelima falsafah tersebut merupakan sifat yang dibangun oleh *Ulu* Lampung dalam menjalani roda kehidupannya dan agar tetap terjaga kehormatannya di mata masyarakat lain. Lima falsafah *Ulu* Lampung itu pula yang mencerminkan bahwa *Ulu* Lampung adalah masyarakat yang mempunyai jiwa sosialisasi yang tinggi.

Seperti falsafah *ulu* Lampung yang ke dua yaitu Juluk-Adok yang merupakan hal penting dalam adat istiadat lampung . Juluk-Adok merupakan gelar adat lampung yang diberikan kepada seseorang (tergantung pada kedudukan, fungsinya serta pada keturunannya) pada masyarakat adat di dalam Kesebatinan. Pada masyarakat adat Lampung Pesisir, yang juga dipakai di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Juluk-Adok tidak diberikan kepada seseorang secara serta merta melainkan harus mempunyai kesatuan masyarakat adat yang telah diberi nama Kesebatinan.

Berdirinya kesebatinan ini juga harus berdasar asal usul marga dan silsilah keturunan dari yang akan di beri gelar (Juluk-Adok). Seperti halnya seseorang yang akan diangkat menjadi sebatin adalah keturunan lurus laki-laki tertua pada masyarakat setempat. Jika laki-laki tertua meninggal atau ada sebab lainnya dan tidak mempunyai keturunan maka diambil saudara laki-laki tertua nomor dua, dan pemberian gelar (Juluk-Adok) dilaksanakan pada saat pernikahan anak laki-laki. Adapun tingkatan Juluk-adok adat Lampung Pesisir

paling tinggi adalah gelar Sultan. Didalam hal ini terlihat bahwa dalam adat Lampung status tertinggi adalah anak laki-laki, anak perempuan dalam adat hanya mengikuti laki-laki.

E. Perspektif *Gender* dan Budaya Patriarki Masyarakat Pedesaan di Lampung

Setelah membahas etnis dan budaya Lampung , maka penulis melanjutkan untuk membahas tentang bagaimana perspektif *gender* dan budaya patriarki masyarakat pedesaan di Lampung. Pada pembahasan ini akan diuraikan beberapa cara pandang mengenai *gender* dan budaya patriarki di Lampung ini, pembahasan ini bertujuan untuk menyinkronkan antara teori *gender* dengan permasalahan pada penelitian ini.

Membicarakan patriarki tidak sesederhana seperti menghitung seberapa banyak perempuan yang terlibat dalam suatu hal tertentu, misalnya pendidikan dan politik. Kajian patriarki dalam penelitian ini nantinya akan disempitkan menjadi bagaimana budaya patriarki yang terjadi pada masyarakat pedesaan di Lampung, tidak lepas dari kajian mengenai *gender* dan feminisme.

Salah satu studi lapangan yang dilakukan oleh Kelompok Perempuan Sadar yang dimuat dalam buku *Getar Gender* yang di tulis oleh A.Nunuk P. Murniati (2004) mengatakan secara umum, patriarki dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki (ayah). Didalam sistem ini laki-laki yang berkuasa untuk menentukan. Sistem ini dianggap wajar sebab disejajarkan dengan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin.

Kehadiran budaya patriarki di tengah masyarakat ini, didukung dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Ilmu antropologi misalnya, memberikan pembenaran bahwa laki-laki adalah bibit (mempunyai sperma) yang disamakan dengan *culture* dan perempuan adalah lahan (mempunyai wadah untuk menyemai bibit) yang disamakan dengan *nature*. Kemudian dikondisikan sebuah pandangan hidup bahwa *culture* (budaya) mengalahkan *nature* (alam). Proses perubahan ini merupakan proses penakhlukan *culture* terhadap *nature*. Pandangan yang berasal dari pembenaran melalui ilmu pengetahuan ini, kemudian menjadi pandangan antropologis patriarkis karena sudut pandang diambil dari laki-laki (Murniati, 2004:69)

Perjalanan budaya patriarki makin kuat dan mantap ketika terjadi perubahan sosial ke masyarakat feodal. Kemudian masyarakat ini berkembang menjadi masyarakat kapitalis dan dikunci dengan sistem militerisme. Akibat perubahan tersebut, dalam masyarakat terdapat pandangan bahwa norma manusia yang dianggap benar apabila dipandang dari sudut laki-laki. Semua ini berlaku diberbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan bahkan agama . (Murniati,2004:80)

Pandangan perspektif laki-laki, yang sampai saat ini masih dianut oleh masyarakat, dinamakan pandangan yang bias *gender*, karena tidak memasukan permasalahan *gender*. Keadaan seperti inilah yang melahirkan diskriminasi terhadap perempuan dan perempuan semakin terbelakang. Mungkin saja hal ini terjadi karena sistem budaya yang ada menghasilkan ketidakadilan, kekerasan dan penindasan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Kelompok Perempuan Sadar mengatakan di Lampung, situasi Kecamatan Padang Ratu, merupakan campuran masyarakat asli dan pendatang dari Jawa. Di sini digambarkan, laki-laki mendapat kesempatan pendidikan lebih tinggi, mempunyai hak untuk menceraikan istri tetapi tidak sebaliknya. Keputusan tentang kehidupan (pengolahan tanah, penentuan jenis tanaman dan sebagainya) ada di tangan laki-laki, gambaran ini menunjukkan hubungan yang terjadi adalah patrilineal.

Indonesia pada dasarnya mempunyai tiga sistem kekerabatan yakni sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah), sistem ini dipakai di Tapanuli, Lampung, Bali dan lain-lain. Kemudian sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan perempuan (ibu), sistem ini dipakai di Sumatra Barat. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan parental yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari laki-laki (ayah) dan juga garis keturunan perempuan (ibu) sistem ini dipakai di Jawa, Sumatera Selatan dan lainnya (Soektio;1989: 45)

Gambaran di atas, tidak jauh berbeda dengan situasi dan kasus yang terdapat di kecamatan atau pedesaan yang ada di Lampung. Padahal sebenarnya dalam adat Lampung, perempuan memiliki posisi yang tinggi dan dihormati. Seorang perempuan telah diberlakukan secara adat sejak lahir. Aturan-aturan yang adat terkait dengan perempuan Lampung merupakan bentuk penjagaan sebagai simbol kebaikan kampung atau keluarga. Maka dari itu perempuan Lampung sangat dibatasi dari kegiatan di luar rumah / sektor publik.

Patriarki merupakan isu besar yang memungkinkan untuk dibagi ke dalam banyak ruang kajian. Karenanya, tulisan ini mempunyai hubungan yang erat antara budaya politik dan perempuan yang berada di desa dan beretniskan Lampung. Yang dimaksudkan dengan budaya politik perempuan etnis Lampung ini adalah bagaimana perempuan yang tinggal di pedesaan dengan kebudayaan Lampung yang masih kental dengan budaya patriarkinya.

F. Kerangka Pikir

Urusan publik adalah urusan laki-laki dan perempuan, laki-laki tidak sekedar berjalan di sektor publik dan perempuan hanya di sektor domestik. Keduanya memiliki peran yang sama. Melalui adanya peran perempuan di sektor publik justru akan memperkuat dampak kebaikan. Keadaan bahwa perempuan hanya boleh di sektor domestik dan laki-laki saja yang berada di sektor publik itu adalah kurang tepat.

Yang dimaksudkan perempuan yang juga harus ikut masuk ke sektor publik tidak harus disertai dengan profesi tertentu seperti berperan sebagai anggota legislatif dan lainnya. Namun peran di sektor publik bisa dilakukan dengan mengikuti kegiatan pengajian, posyandu, atau bahkan ikut rapat di desa dan lainnya. Seharusnya baik laki-laki maupun perempuan bersama-sama harus mengurus urusan publik maupun domestik.

Didalam konteks budaya maka penulis beranggapan bahwa minimnya peran perempuan dalam sektor publik karena diimplikasi paham ideologis. Misalnya perempuan tidak dibenarkan masuk ke ranah publik karena dapat

menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, kekacauan tersebut dilekatkan pada kesalahan perempuan. Selain itu perempuan juga dianggap akan menuntut keadilan dan kesetaraan *gender* dalam semua aturan, kebijakan, program dan kegiatan publik.

Keadaan ruang publik saat ini menuntut karakter maskulin yang tegas, sehingga tidak diperlukan karakteristik feminitas yang berupa kesabaran, kejujuran dan kesetiaan. Sementara, kekuasaan publik identik dengan persaingan dan konflik dengan penyelesaian masalah dengan cara yang keras.

Tantangan lain dari perempuan di sektor publik adalah dari aspek budaya. Feminitas dianggap sebagai kelemahan, bukan sebagai kelengkapan mesin sosial. Sektor publik yang diperlukan adalah karakteristik maskulinitas sementara perempuan merupakan adalah sosok yang kekurangan maskulinitas.

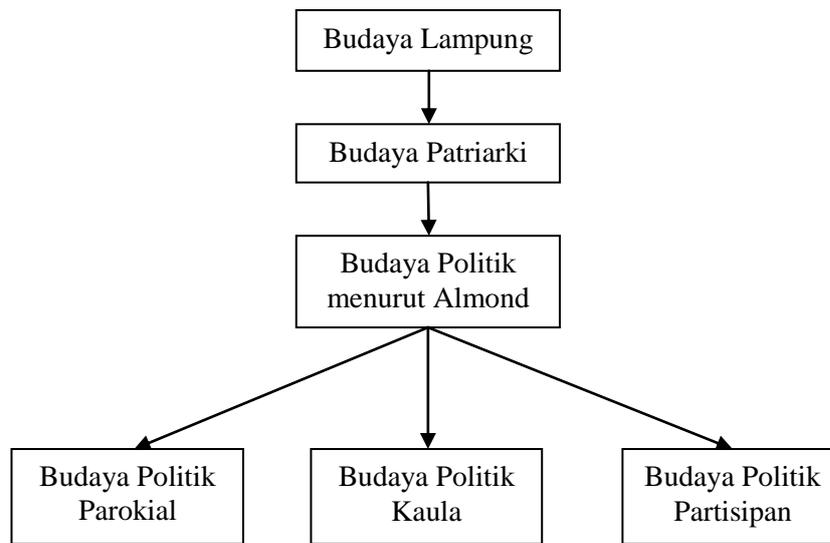
Sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan berperan di sektor publik bila dilihat dari kaca mata agama Islam. Seperti telah dijelaskan pada tinjauan tentang *gender* di pembahasan awal, dan juga telah diatur dalam Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasional (pusat kajian wanita dan *gender*, Universitas Indonesia, 2005) yaitu ;

- Pertama : Melaksanakan pengarusutamaan *gender* guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif *gender* sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
- Kedua : Memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman pengarus utamaan *gender* dalam pembangunan nasional sebagaimana terlampir dalam intruksi presiden ini sebagai acuan dalam pengarus utamaan *gender*.

Lemahnya pemberdayaan perempuan tidak terlepas dari historis, pengaruh konsep kultur, ras, politik dan agama yang berlangsung lama. Kemudian diiringi dengan pemahaman agama yang keliru dan mendiskriminatifkan perempuan adalah sangat dominan. Selain itu nilai agama yang dianut terkadang tarik-menarik terhadap nilai budaya. Dampaknya adalah ketidakadilan *gender*, kekerasan, diskriminasi dan penindasan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti mempunyai pemahaman bahwa pada dewasa ini kesetaraan *gender* sangat diperlukan demi keberlangsungan dan kebaikan kehidupan bermasyarakat di pedesaan. Selanjutnya tidak menyalahkan agama dan kebudayaan yang telah berlangsung lama di dalam kehidupan masyarakat desa, namun baik dari pihak perempuan dan laki-lakinya harus memperhatikan hak-hak yang telah ada tanpa melihat budaya patriarki yang ada.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka kaum perempuan etnis Lampung di Desa Gunung Sugih diharapkan untuk segera bangkit dan sadar akan hak dan kemampuannya di sektor publik, dan kepada laki-laki juga diharapkan tidak membatasi keberadaan perempuan lagi, berilah ruang gerak yang luas untuk perempuan mengembangkan kemampuannya di sektor publik. Kemudian bagan kerangka pikir berikut ini :



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir